

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA	
A. Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Asas <i>Geen Straft Zonder Schuld</i> dan Pemidanaan	21
1. Perbuatan Pidana.....	21
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
3. Asas <i>Geen Straft Zonder Schuld</i>	25
4. Pemidanaan.....	30
B. Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korupsi	31
1. Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana	31
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	36
3. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	38

4. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>)	40
5. Teori Gabungan	42
6. Menentukan Kesalahan Korporasi	43
C. Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi pada Korporasi.....	46
1. Tindak Pidana Korupsi.....	46
2. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi pada Korporasi	48
BAB III. TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PIDANA	
A. Hukum Acara Pidana.....	50
1. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana	50
2. Surat Dakwaan	54
3. Hukum Pembuktian : Asas, Beban Pembuktian dan Alat Bukti.....	59
4. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Peradilan Pidana	66
5. Hakekat Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	67
B. Hukum Acara Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.....	70
C. Hukum Acara Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016	76
BAB IV. ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 77 PK/PID.SUS/2015	
A. Kasus Posisi	82
1. Identitas Terdakwa.....	82
2. Surat Dakwaan	88
3. Surat Tuntutan.....	91
4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 01/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST.....	92
5. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/TPK/2013/PT.DKI	98
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.SUS/2014	100
7. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77PK/PID.SUS/2015	102
B. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.....	104
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi secara Hukum Materil	104
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi secara Hukum Formil	110

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Belum Melalui Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 77 PK/PID.SUS/2015.....	115
1. Penyimpangan terhadap Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPTPK, dimana PT. IM2 Belum Melalui Suatu Proses Penuntutan namun Telah Dijatuhkan Suatu Pidanaan	115
2. Penyimpangan terhadap Asas <i>Due Process of Law</i>	119
D. Ketentuan PERMA Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi terhadap Perkara <i>Aquo</i>	129

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Putusan Perkara Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 atas nama Terdakwa Indar Atmanto tanggal 20 Oktober 2015.**
- B. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-28/A/JA/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi.**
- C. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Tanggal 29 Desember 2016.**